



02 GOVERNMENTTODAY  
Perajin Tahu Tempe Sepakat Harga Kedelai  
Rp 11.500/Kg

05 NUSANTARA  
Kepolisian Malaysia Ringkus 11 WNI Terkait Perampokan  
Bersenjata

10 LISTSTYLE  
Tak Perlu Filter! Cara Fotogenik di Depan Kamera

# UGAL-UGALAN BELANJA BGN

## Jasa EO Rp113 M, Kaos Kaki Rp6,9 M

**B**adan Gizi Nasional (BGN) tengah menghadapi sorotan tajam terkait disorientasi alokasi anggaran yang dinilai lebih mengutamakan belanja pendukung ketimbang substansi program. Diketahui, fi tengah upaya efisiensi, lembaga ini justru menganggarkan Rp1,2 triliun untuk pengadaan motor listrik. Ternyata tak hanya itu, dana Rp1,1 triliun digunakan untuk belanja laptop dan tablet. Angka fantastis ini dianggap tidak proporsional. Apalagi di lapangan dilaporkan penyusutan nilai makanan hingga di bawah Rp10.000 per porsi. Kontras anggaran semakin terlihat pada pos belanja operasional yang bersifat remeh-temeh. Seperti pengadaan kaos kaki senilai Rp6,9 miliar dan seragam sebesar Rp68,3 miliar. BGN juga mengalokasikan Rp113 miliar untuk jasa event organizer. Jika anggaran untuk mendandani birokrasi tersebut dialihkan seluruhnya untuk makanan, maka dana yang terbuang itu setara dengan 11.300.000 porsi. Itu baru satu pos, bagaimana jika semua lini dicurangi? **BACA HAL 11...**

### ANGGARAN KEMENTERIAN TERBESAR 2026

Badan Gizi Nasional  
**Rp 217.8 Triliun**

Kementerian Pertahanan  
**Rp 167.4 Triliun**

Polri  
**Rp 109.7 Triliun**

Kementerian Kesehatan  
**Rp 104.35 Triliun**

Kementerian Sosial  
**Rp 76 Triliun**

Kementerian Agama  
**Rp 75.21 Triliun**

Kementerian Pekerja Umum  
**Rp 71 Triliun**

Kemdiktisaintek  
**Rp 55.4 Triliun**

Kementerian Keuangan  
**Rp 47.1 Triliun**

Kementerian Pendidikan dasar & menengah  
**Rp 33.6 Triliun**

Sumber  
Berbagai Sumber Diolah

### FOKUS GIZI ATAU PESTA BELANJA BIROKRASI?

Kaos kaki lapangan (17.000 pasang)  
**Rp 6,9 M**

Seragam SPPI  
**Rp 68,3 M**

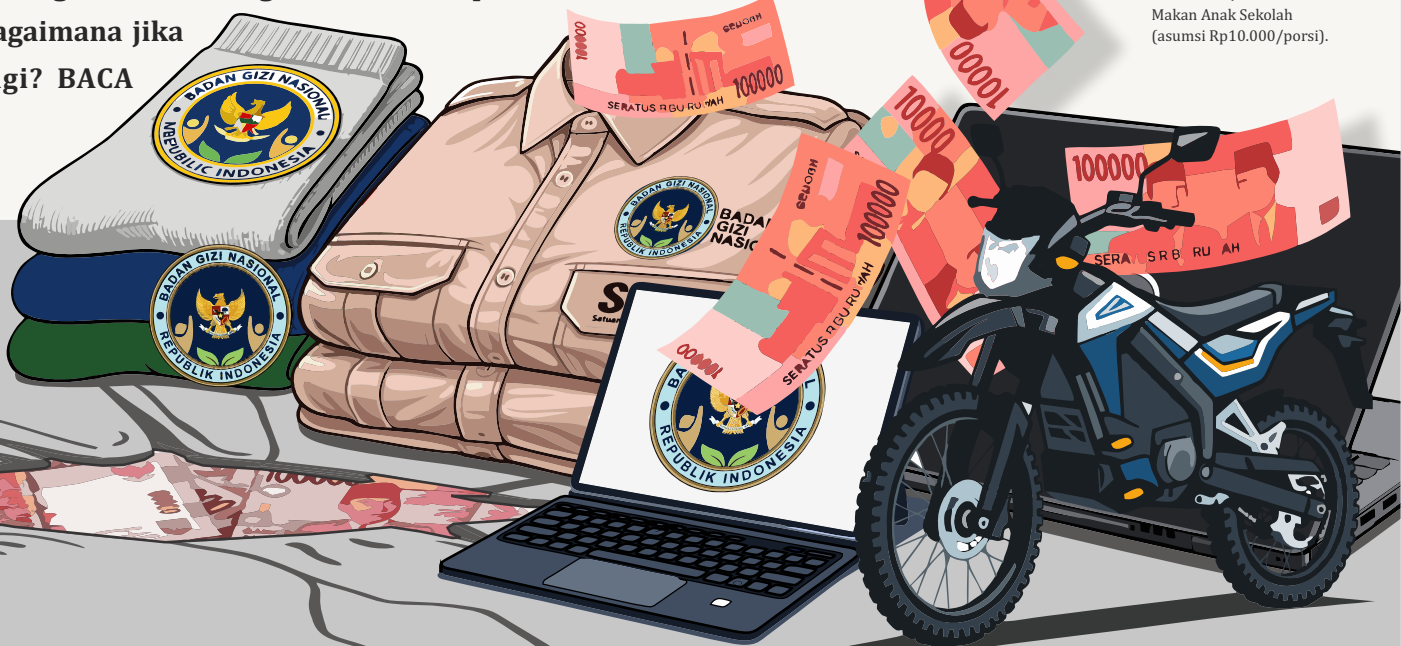
Jasa Event Organizer  
**Rp 113 M**

Laptop & Tablet  
(32rb laptop + 30rb tablet)  
**Rp 1,1 T**

Motor Listrik (±25.000 unit)  
**Rp 1,2 T**

Anggaran Belanja EO  
**Rp 113 M**

Setara 11,3 Juta Porsi Makan Anak Sekolah (asumsi Rp10.000/porsi).



# PERAJIN TAHU TEMPE SEPAKAT HARGA KEDELAI RP 11.500/KG

Di tengah ketidakpastian rantai pasok dunia akibat tensi geopolitik, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat mengamankan stabilitas harga pangan. Pihak importir dan para pengrajin tahu-tempe telah menetapkan Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai Rp11.500 per kilogram. Hal ini untuk mencegah lonjakan harga di tingkat konsumen.

**D**irektur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Yudi Sastro, secara tegas mem-bantah rumor yang menyebutkan harga kedelai melambung hingga Rp20.000 per kilogram. Berdasarkan verifikasi langsung di lapangan, ia memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang tidak berdasar.

"Kami sudah verifikasi langsung ke pelaku usaha, dan informasi yang



Warga bersepeda saat Peringatan 30 Hari Pasca Serangan Air Keras terhadap aktivis Andrie Yunus di Jalan Salemba I, Senen, Jakarta, Minggu (12/4/2026). (ist)

menyebut harga kedelai tembus Rp20 ribu itu tidak benar. Harga tetap di bawah HAP, bahkan di level importir masih sekitar Rp11.500. Persediaan masih cukup, harga juga masih terkendali sesuai dengan acuan pemerintah. Jadi tidak perlu

dikhawatirkan," tegas Yudi, Minggu (12/4/2026).

Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung pada Kamis (9/4/2026), disepakati bahwa harga kedelai di tingkat importir dipatok sebesar Rp11.500 per kilogram. Ketetapan ini

menjadi fondasi agar harga di tingkat pengrajin tetap terkendali di bawah angka Rp12.000 per kilogram.

Meskipun biaya logistik dan transportasi internasional sedang meningkat, pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal implementasi HAP ini agar masyarakat tidak terbebani.

Dari sisi penyedia bahan baku, Direktur PT FKS Multi Agro Tbk, Tjung Hen Sen, mengungkapkan bahwa para pelaku usaha sedang bekerja keras melawan tekanan eksternal seperti kenaikan biaya asuransi kapal dan logistik global. Saat ini, harga di tingkat importir sebenarnya masih bergerak sangat kompetitif di angka Rp10.100 hingga Rp10.300, tergantung pada wilayah distribusi.

"Menjaga stabilitas bukan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan melibatkan semua pihak baik swasta maupun pemerintah. Perlu saling bekerja sama supaya suasana usaha menjadi lebih kondusif," ujar Hen Sen.

Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menjamin bahwa tahu dan tempe akan tetap tersedia di pasar dengan harga stabil.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo, menjelaskan bahwa meskipun harga kedelai stabil, tantangan justru muncul dari harga bahan penunjang seperti plastik kemas. Untuk menyaingi hal tersebut tanpa membebani konsumen dengan kenaikan harga yang drastis, para pengrajin memilih melakukan penyesuaian pada dimensi produk.

"Kami jamin tahu tempe tidak naik harganya, tapi mungkin ada penyesuaian dari sisi volume. Dari sisi rasa dan kualitas tetap kami jaga. Kami harap masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu berita yang tidak sesuai," jelas Wibowo.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi sekaligus peringatan kepada para importir agar mengedepankan kepentingan nasional di atas keuntungan semata. Ia menekankan bahwa stabilitas pangan adalah bentuk bakti kepada negara.

"Terkait kedelai, kami sudah minta teman-teman importir jangan mengambil keuntungan besar. Naik bolehlah naik tetapi jangan sampai itu menekan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kapan lagi kita mau berbuat baik pada bangsa, ini kesempatan emas untuk berbuat baik pada negara kita yang kita cinta," pungkas Mentan Amran.

Sebagai langkah jangka panjang untuk memutus ketergantungan pada impor, Kementan tahun ini memprioritaskan program pengembangan lahan kedelai seluas 37.500 hektare. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kedaulatan pangan lokal sehingga fluktuasi harga global tidak lagi berdampak signifikan terhadap meja makan masyarakat Indonesia. (wid,ist,ant/dya)

## Sebaran Harga Kedelai di Indonesia (per 8 April 2026)

- Jakarta: **Rp10.500 - Rp11.000 /kg**
- Jawa: **Rp10.555 /kg**
- Bali & NTB: **Rp10.550 /kg**
- Sumatra: **Rp11.450 /kg**
- Sulawesi: **Rp11.113 /kg**
- Kalimantan: **Rp10.908 /kg**

## Fakta Kedelai Nasional

- Ketergantungan Impor: >90% untuk industri tahu & tempe.
- Produksi Lokal: 1,5 - 1,7 ton/hektare (Global: 3,3 ton/hektare).
- Kendala Utama: Iklim lembap, tanah masam, dan keterbatasan teknologi



**TAHU** dan tempe telah lama menjadi identitas kuliner sekaligus sumber protein utama bagi masyarakat Indonesia. Namun, sebuah realitas pahit tersembunyi di balik konsumsi massal tersebut: hampir seluruh bahan bakunya berasal dari luar negeri. Ketergantungan ini bukan sekadar masalah perdagangan,

melainkan cermin dari tantangan besar di sektor hulu pertanian nasional.

Pakar Ilmu Tanah dari Universitas Andalas (Unand), Prof. Dian Fiantis, mengungkapkan sebuah angka yang cukup mengejutkan. Menurutnya, dominasi kedelai asing dalam industri pengolahan tahu dan tempe nasional telah melampaui batas kewajaran.

"Sekitar 80 hingga 90 persen kebutuhan kedelai nasional masih dipenuhi dari impor, bahkan untuk industri tahu dan tempe angkanya bisa lebih dari 90 persen," ungkap Prof. Dian.

Indonesia tercatat mendatangkan lebih dari 2,5 juta ton kedelai setiap tahun dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Kedelai impor seringkali menjadi pilihan utama perajin karena ukuran bijinya yang lebih besar dan seragam dibandingkan hasil panen lokal.

Berdasarkan data, produktivitas lahan kedelai di Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 1,5 hingga 1,7 ton per hektare. Angka ini

tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara produsen global yang mampu menembus angka 3,3 ton per hektare. Rendahnya angka ini, menurut Prof. Dian, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan tropis yang kurang bersahabat bagi fase kritis tanaman kedelai.

"Di negara seperti Brasil dan Amerika Serikat, tanaman mendapatkan cukup air di awal pertumbuhan dan kondisi kering saat pengisian biji. Ini membuat biji lebih besar dan seragam. Di Indonesia, fase pengisian biji sering terjadi dalam kondisi lembap atau hujan, sehingga biji tidak terisi penuh," jelasnya.

Selain faktor cuaca, hambatan utama lainnya terletak pada karakteristik tanah di Indonesia. Lahan tropis cenderung memiliki tingkat keasaman yang tinggi (masam) serta kekurangan unsur hara esensial seperti fosfor dan nitrogen. Kondisi ini diperparah dengan dominasi petani skala kecil yang masih menggunakan cara-cara konvensional tanpa sentuhan teknologi presisi. (wid,ist,kum/dya)

**P**oin paling krusial dalam draf ini adalah pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas sebagai pelaksana tunggal kegiatan hulu. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1, pemerintah pusat selaku

## RUU Migas 2026

# ADA PASAL SAKTI 'BUK' DAN HARGA TUNGGAL BBM

Draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) tertanggal 3 Maret 2026 membawa perubahan fundamental. Ada dua poros utama yaitu penguatan kelembagaan melalui badan baru dan intervensi harga oleh negara. Namun, di balik rencana efisiensi tersebut, sejumlah pengamat mengingatkan adanya risiko beban fiskal dan tantangan tata kelola yang membayangi.

### 'PASAL SAKTI' PEMBENTUKAN BUK MIGAS DALAM DRAF RUU MIGAS

#### ○ Pasal 5 ayat 1 (Delegasi Kuasa):

Di pasal ini disebutkan bahwa pemerintah pusat mendelegasikan pengusahaan kegiatan hulu secara langsung kepada BUK Migas. Artinya, BUK Migas bukan sekadar pengawas (seperti SKK Migas saat ini), melainkan badan usaha yang memegang kendali operasional atas nama negara.

#### ○ Pasal 6 (Garis Komando Langsung):

Pasal ini mengatur bahwa BUK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Inilah yang membuat lembaga ini sangat kuat karena memangkas birokrasi di bawah kementerian, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan strategis berada dalam satu jalur pendek ke kepala negara.

#### ○ Pasal 7 ayat 2 (Kendali Operasi):

Pasal ini menegaskan bahwa meskipun ada kontrak kerja sama dengan pihak swasta atau kontraktor, "manajemen operasi kegiatan usaha hulu tetap berada pada BUK Migas." Hal ini memastikan BUK Migas memiliki hak suara mutlak dalam menentukan jalannya proyek migas di lapangan.



(Ilustrasi) Kendaraan niaga menggunakan bahan bakar Biodiesel B50. (dok)

pemegang kuasa pertambangan mendelegasikan penuh pengusahaan hulu kepada badan ini. BUK Migas didesain untuk memotong rantai birokrasi dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekaligus memegang kendali atas manajemen operasi dan penawaran Wilayah Kerja

(WK).

"Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pengusahaan kegiatan usaha hulu kepada BUK Migas," tulis baleid tersebut dilihat Minggu (12/4/2026).

Ekonom Center of Reform on

Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai struktur yang ringkas ini memang berpotensi mempercepat koordinasi. Meski begitu, ia memberikan catatan kritis pada aspek profesionalisme.

"Tetap diperlukan mekanisme tata kelola yang kuat agar lembaga ini tetap profesional, transparan, dan tidak mudah terpengaruh dinamika jangka pendek," ujarnya.

Selain penguatan lembaga, RUU ini memberikan mandat tegas terkait ketahanan energi domestik melalui Pasal 26. Kontraktor diwajibkan menyerahkan paling sedikit 25 persen dari produksi bagiannya untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation).

Ambisi pemerataan juga tertuang pada sektor hilir melalui kebijakan harga tunggal. Pasal 36 ayat 2 menyebutkan pemerintah pusat mengatur harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Langkah serupa berlaku bagi gas bumi golongan tertentu dan LPG.

Yusuf Rendy mengingatkan bahwa kebijakan satu harga ini menyimpan konsekuensi ekonomi yang nyata, terutama pada biaya distribusi ke daerah terpencil. Ia menekankan perlunya skema kompensasi yang transparan agar tidak menjadi bumerang bagi APBN maupun badan usaha pelaksana.

"Jangan sampai memberikan tekanan berlebih pada APBN maupun pada badan usaha yang menjalankannya," tuturnya.

Intervensi negara kian tebal karena penetapan harga energi tersebut tidak lagi menjadi domain penuh eksekutif, melainkan harus melewati pintu parlemen. Pasal 37 ayat 5 menegaskan bahwa penetapan harga gas bumi untuk golongan masyarakat tertentu terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPR.

Di sisi lain, kejelasan peran BUK Migas dianggap perlu dipertegas agar tidak tumpang tindih dengan entitas yang sudah ada seperti PT Pertamina (Persero). Menurut Yusuf, pemerintah dan DPR harus memperjelas apakah badan ini akan fokus menarik investasi di hulu atau justru lebih condong pada fungsi pengendalian di hilir. (wid,ktn,ist/dya)

## Bahlil Sebut B50 Wujudkan Swasembada Solar

mengimpor solar jadi. Data Ditjen Migas menunjukkan impor solar berhasil ditekan dari 12,17 persen pada 2025 menjadi hanya 6,26 persen hingga Februari 2026. Sebaliknya, tantangan besar masih tersisa pada komoditas bensin yang porsi impornya mendominasi di level 59 persen atau setara 20-22 juta kiloliter.

Soal penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dikatakan masih berlangsung. Bahlil memastikan bahwa cadangan BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) nasional dalam posisi aman.

"Nanti kami akan menjelaskan di saat sudah melakukan penyelesaian exercise, sedikit lagi. Tunggu lah ya. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal, di atas 20 hari semua, termasuk LPG di atas 10 hari," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan bahwa Indonesia telah melewati masa kritis terkait dengan pasokan energi di

tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah. Meski begitu, Bahlil menekankan agar masyarakat bisa tetap menggunakan BBM dan LPG secara bijak.

"Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita, terhadap dinamika global untuk BBM, Alhamdulillah sudah kami lewati. Tetapi saya minta kepada seluruh masyarakat, harus bijak, arif dan memakai BBM, termasuk LPG," ujar Bahlil.

Optimisme pemerintah mendapat dukungan dari pelaku industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, memastikan pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam negeri memadai untuk menyokong B50. Dengan proyeksi produksi CPO 2025 sebesar 51,6 juta ton, kebutuhan B50 yang diperkirakan mencapai 16 juta ton serta kebutuhan pangan domestik 10 juta ton masih dapat terpenuhi. (tin,ist/dya)



**PEMERINTAH** secara paralel mengejar target ambisius swasembada solar melalui mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan B50 adalah langkah strategis agar Indonesia tidak lagi didikte oleh pasar global. Saat ini, uji coba B50 pada alat berat, kereta api, dan otomotif telah mencapai taraf 60 hingga 70 persen.

"Insyaallah bulan Mei-Juni hasil akhirnya sudah selesai. Ini kebijakan negara supaya kita tidak tergantung pada global, khususnya untuk solar," ujar Bahlil.

Langkah ini mempertegas posisi Indonesia yang kini sudah tidak lagi

30 HARI KASUS AIR KERAS ANDRIE KONTRAS

**KOALISI DESAK PRESIDEN PRABOWO BENTUK TGPF**

Gelombang tuntutan keadilan bagi aktivis KontraS, Andrie Yunus, semakin menguat tepat 30 hari pasca-insiden penyiraman air keras di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Koalisi masyarakat sipil kini secara resmi melayangkan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah luar biasa demi mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut.

**P**enanganan kasus yang saat ini dilimpahkan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI ke Oditur Militer II-07 Jakarta menuai kritik tajam. Keputusan tersebut dinilai tidak memberikan ruang bagi transparansi dan keadilan publik.

Sarah, perwakilan dari Koalisi Solidaritas untuk Andrie Yunus, menegaskan bahwa penyerangan brutal ini memiliki dimensi yang lebih luas. Serangan terhadap Andrie dianggap sebagai upaya sistematis untuk membungkam partisipasi politik generasi muda yang kritis dalam menjaga napas demokrasi di Indonesia.

“Bukan hanya penangkapan pelaku penyiraman, akan tetapi juga pengungkapan aktor intelektual di balik percobaan pembunuhan dan kejahatan terorganisir tersebut,” ujar Sarah dalam keterangan resminya, Minggu (12/4/2026).

Sarah menambahkan bahwa Andrie Yunus secara pribadi telah menyatakan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum hanya berhenti di lingkup internal militer. Kekhawatiran akan adanya impunitas atau perlindungan terhadap pelaku menjadi alasan utama penolakan tersebut.

Menyikapi kebuntuan rasa keadilan, Koalisi Solidaritas bersama berbagai organisasi bantuan hukum menyampaikan tiga poin tuntutan kepada otoritas tertinggi negara.

Pertama, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen. TGPF dinilai mendesak untuk menyalisir fakta-fakta yang tidak terjangkau oleh penyidikan militer biasa.

Kemudian meminta agar pelaku diadili melalui peradilan pidana umum, bukan peradilan militer. Hal ini sejalan dengan upaya koalisi mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempercepat putusan uji materiil (JR) UU TNI yang berkaitan dengan yurisdiksi peradilan.

Terakhir, mendorong Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan pro-justisia guna memperkuat bukti adanya pelanggaran HAM berat dan kejahatan terorganisir.

Aksi yang digelar di titik penyiraman di Jakarta Pusat tidak hanya menjadi ajang tuntutan hukum, tetapi juga ruang pemulihan bagi para aktivis yang merasa terancam. Penulisan surat untuk Andrie dan penggambaran mural menjadi simbol bahwa gerakan sipil tidak akan surut meski dihantam teror.



Warga bersepeda saat Peringatan 30 Hari Pasca Serangan Air Keras terhadap aktivis Andrie Yunus di Jalan Salemba I, Senen, Jakarta, Minggu (12/4/2026). (ist)

“Kegiatan ini adalah upaya yang kami lakukan untuk bersama-sama melawan ketakutan yang hendak ditanamkan oleh penguasa. Kami meyakini bahwa solidaritas adalah kekuatan untuk melawan teror tersebut,” tegas Sarah menutup pernyataannya.

Hingga saat ini, publik masih menanti respons dari Istana maupun kementerian terkait mengenai

kemungkinan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus yang telah menjadi perhatian internasional ini. Sementara itu, Andrie Yunus masih dijadwalkan menjalani perawatan medis intensif guna memulihkan dampak luka bakar kimia yang dialaminya.

Oditur Militer Jakarta menegaskan bahwa kasus teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator

KontraS, Andrie Yunus, akan tetap diselesaikan melalui mekanisme peradilan militer.

Pernyataan ini disampaikan Oditur Militer Kolonel Chk Andri Wijaya, merespons usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait perlunya kehadiran hakim ad hoc dalam persidangan perkara tersebut.

“Berdasarkan penilaian kami selama penanganan kasus ini, penyelesaian masih berada dalam koridor lingkungan peradilan militer,” ujar Andri kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Minggu (12/4/2026). Ia menjelaskan, seluruh tersangka dalam kasus tersebut memenuhi unsur yurisdiksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (tin,iar,ryt/dya)

**KASUS AIR KERAS AKTIVIS KONTRAS**

- Tetap di Peradilan Militer Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dipastikan diproses di peradilan militer
- Alasan Yurisdiksi Seluruh tersangka merupakan prajurit TNI aktif, sesuai UU No. 31/1997
- Sikap Oditur Militer “Berdasarkan penilaian kami... masih berada dalam koridor peradilan militer”
- Sorotan Wapres Gibran Rakabuming Raka dorong proses hukum yang transparan dan akuntabel.
- Usulan Hakim Ad Hoc “Keadilan harus hadir secara nyata...” serta penting menjaga kepercayaan publik.



**5 Kali Operasi, Cangkok Kulit ke Wajah hingga Dada**

**ANGGOTA** Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), Fatia Maulidiyanti, mengatakan operasi kelima yang dijalani Andrie untuk bagian kulit dan matanya. Operasi tersebut adalah skin graft atau cangkok kulit untuk memindahkan kulit sehat dari bagian tubuh ke area tubuh lain yang mengalami kerusakan.

Untuk operasi cangkok kulit yang dijalani Andrie Yunus, kulit bagian pahanya yang diambil untuk dipindahkan ke area dada, lengan, dan muka.

“Sampai dengan saat ini juga Andri sudah menjalani sekitar lima kali operasi untuk kulit dan juga mata. Untuk kulitnya sudah dijalankan operasi skin graft, jadi penambalan dari kulit paha ke sekujur badannya di bagian dada leher dan lengan gitu, dan mukanya juga,” ujar Fatia di Taman Diponegoro depan RSCM saat rangkaian walking tour memperingati satu bulan kasus

Andrie Yunus, Minggu (12/4/2026).

Selain itu, Fatia juga mengungkapkan seluruh muka Andrie terkena luka bakar. Utamanya di bagian sebelah kirinya, yang bekas cipratan air keras itu banyak terlihat.

“Jadi sebelah mukanya ini semuanya terkena luka bakar, dan di sebelah kirinya banyak bekas cipratan-cipratan si air keras tersebut,” kata Fatia.

Oleh karena itu, Fatia mengatakan bahwa Andrie masih akan menjalani perawatan intensif sampai beberapa waktu ke depan. Dijadwalkan dalam empat bulan mendatang Andrie akan kembali menjalani operasi.

“Jadi Andrie akan masih tetap menjalani pengobatan sampai dengan beberapa bulan ke depan, dan 4 bulan lagi juga Andrie rencananya akan kembali dioperasi matanya,” tutur Fatia.

Kini Andrie dirawat secara intensif di ruang High Care Unit

(HCU) RSCM. KontraS mengungkapkan bahwa akibat kondisi Andrie yang demikian, ia belum bisa dijenguk oleh siapa pun.

Sementara itu, kasusnya kini telah dilimpahkan oleh Puspom TNI ke Oditur Militer. Adapun empat tersangka telah disebut oleh Puspom TNI sebagai pelaku, namun TAUD menduga setidaknya ada 16 pelaku. (wid,ist/dya)

# KEPOLISIAN MALAYSIA RINGKUS 11 WNI TERKAIT PERAMPOKAN BERSENJATA

Kabar kurang sedap datang dari negeri jiran. Kepolisian Malaysia baru saja meringkus 11 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat menjadi otak di balik serangkaian perampokan bersenjata di wilayah Pulau Pinang. Kelompok ini diketahui menyasar rumah-rumah yang dihuni oleh para pekerja migran.

**O**perasi penangkapan yang diberi nama Ops Rantau Kongsi ini dilakukan secara maraton pada Kamis (9/4/2026) hingga Minggu (12/4/2026). Tim kepolisian bergerak di beberapa titik strategis, mulai dari Chemor di Perak hingga Seberang Perai Tengah (SPT).

Kepala Kepolisian Pulau Pinang, Datuk Azizee Ismail, menjelaskan penangkapan ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari penyelidikan intensif dan pengintaian panjang yang dilakukan anak buahnya.

"Dalam serangkaian penggerebekan tersebut, polisi menangkap sembilan pria dan dua perempuan berusia antara 22 hingga 38 tahun," ujar Azizee dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Harian Metro Malaysia.

Dalam aksinya, komplotan ini



Sepasang suami istri asal Indonesia termasuk di antara 11 tersangka yang ditahan terkait lima kasus perampokan bersenjata di lokasi konstruksi di Penang, Malaysia. (dok.NSTP)

tergolong cukup nekat dan terorganisir. Mereka biasanya mengincar "rumah kongsi" atau hunian sementara yang berada di area

proyek konstruksi, tempat di mana banyak pekerja asing menetap.

Modusnya pun serupa di setiap lokasi. Pelaku mengenakan topeng

agar identitasnya tersembunyi, lalu mengancam korban menggunakan senjata tajam seperti parang. Tak hanya itu, mereka juga membekali diri dengan cable ties (pengikat kabel) untuk melumpuhkan tangan dan kaki para korban sebelum menguras habis harta benda di dalam rumah.

## Barang Bukti: Perhiasan hingga Uang Tunai

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan tindak kriminal mereka. Di antaranya adalah perhiasan, berbagai jenis ponsel, hingga uang tunai senilai 2.770 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp 12 juta. Polisi juga menyita senjata tajam dan pengikat kabel yang digunakan saat beraksi.

Sejauh ini, polisi meyakini setidaknya ada lima kasus besar yang berhasil diungkap lewat penangkapan ini. Salah satu aksi paling merugikan terjadi pada Minggu (5/4/2026) di Seberang Perai Selatan (SPS). Kala itu, korban harus kehilangan harta senilai 35.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp 120 juta lebih).

Berdasarkan pengecekan data kepolisian, mayoritas dari mereka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Disebutkan, 10 orang bersih dari catatan kejahatan dan 1 orang tercatat pernah memiliki pelanggaran terkait masalah imigrasi.

Kini, ke-11 WNI tersebut harus mendekam di sel tahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 395 dan 397 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia tentang perampokan berkelompok dan penggunaan senjata, yang membawa ancaman hukuman cukup berat di sana. (tin,met,ist/dya)

## Operasi Laut Negeri Jiran Ciduk 210 WNI dalam 2 Bulan

**KETEGASAN** otoritas maritim Malaysia di wilayah perairan semakin meningkat. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan, sedikitnya 210 warga negara Indonesia (WNI) terjaring operasi pengawasan laut besar-besaran yang digelar oleh aparat setempat.

Penindakan ini merupakan bagian dari operasi laut yang merupakan bagian dari operasi khusus bertajuk Ops Khas Pagar Laut 1/2026 yang berlangsung sejak 27 Februari hingga 10 April 2026. Secara keseluruhan, operasi ini menciduk 617 orang dari berbagai negara dan menyita barang-barang ilegal dengan nilai tak main-main, yakni mencapai 4,6 juta ringgit Malaysia (sekitar Rp 16 miliar).

Direktur Jenderal Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA), Laksamana Datuk Mohd Rosli Abdullah, mengungkapkan bahwa WNI menjadi kelompok warga asing yang paling mendominasi dalam daftar penangkapan kali ini.

"Warga Indonesia mencatat jumlah tertinggi dengan 210 orang, disusul warga Myanmar sebanyak 84 orang," ujar Rosli sebagaimana dilansir dari kantor berita Bernama, Minggu (12/4/2026).

Pihak otoritas Malaysia mengidentifikasi bahwa jalur laut masih menjadi "pintu masuk" favorit bagi aktivitas ilegal lintas negara. Mulai dari penyelundupan manusia hingga peredaran barang-barang terlarang, semuanya memanfaatkan celah di luarnya perairan kawasan.

Wilayah-wilayah seperti Sabah, Labuan, Johor, serta Kedah dan Perlis menjadi titik yang paling sering mencatat pelanggaran hukum. Wilayah ini memang dikenal strategis namun rentan disalahgunakan sebagai jalur lintas batas ilegal.

Berbagai pelanggaran yang ditemukan petugas di lapangan meliputi Pelanggaran Undang-Undang Perikanan; Pelanggaran aturan pelayaran dan Pelanggaran administrasi imigrasi (masuk tanpa dokumen resmi).

Operasi intensif ini sengaja dilakukan sebagai langkah antisipasi menekan angka kejahatan maritim, terutama saat mendekati periode hari-hari besar di mana aktivitas lintas batas biasanya meningkat tajam.

Dalam menjalankan tugasnya, MMEA mengerahkan berbagai aset tempur dan pantau, mulai dari kapal

patroli hingga pengawasan lewat udara. Sistem deteksi dini juga diperkuat agar pergerakan mencurigakan di tengah laut bisa segera ditindak sebelum mencapai daratan.

Selain melakukan tindakan represif berupa penangkapan, pemerintah Malaysia kini juga gencar memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir.

Harapannya, warga lokal dapat membantu petugas dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang mereka lihat di sekitar perairan guna menjaga keamanan bersama di kawasan Asia Tenggara.

Sebelumnya, Otoritas Malaysia berhasil membongkar tiga perkampungan ilegal tersembunyi yang dihuni oleh ratusan pendatang asing tanpa izin, termasuk warga negara Indonesia (WNI). Pemukiman tersebut ditemukan di tengah kawasan perkebunan kelapa sawit di Setia Alam lewat operasi gabungan pada Jumat (3/4/2026). Dari total 356 warga asing yang diperiksa, petugas menahan 214 orang yang terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga anak-anak. (tin,ber,ist/dya)



Ratusan orang asing ditahan dalam penggerebekan yang dipimpin oleh Departemen Imigrasi di kawasan industri di Balakong dan Shah Alam.

## Target Desember Kelar, Perbaiki Jalan Gondanglegi-Balekambang Kini Capai 60%



Ilustrasi: Proyek pembangunan jalan Gondanglegi-Balekambang. (foto:Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jatim-Bali)

**MALANG** - Perbaikan jalan Gondanglegi-Balekambang kini telah mencapai 60 persen. Proyek strategis tersebut terus dikebut dengan target penyelesaian di Desember 2026.

"Perbaikan jalan Gondanglegi-Balekambang sudah mencapai sekitar 60 persen. Ada yang sudah mulus juga, jalannya sudah bagus," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma, dikutip pada Minggu

(12/4/2026).

Pria yang akrab disapa Oong itu menambahkan, sebagian besar ruas jalan dari arah Gondanglegi telah menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, kondisi jalan sudah mulus hingga mendekati kawasan lahan Sekolah Rakyat atau yang dikenal dengan Jembatan Pelangi.

Dijelaskannya, proyek peningkatan jalan tersebut terbagi dalam 2 paket pekerjaan atau lot. Yakni

Lot 16A sepanjang 16 kilometer dengan anggaran Rp167 miliar, serta Lot 16B sepanjang 14,485 kilometer dengan anggaran Rp172 miliar.

Namun demikian, Oong menegaskan pekerjaan masih menghadapi tantangan berat di sejumlah titik, khususnya pada ruas dari Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, menuju simpang Balekambang. Kondisi geografis yang ekstrem membuat proses pengerjaan membutuhkan penanganan khusus.

Oong mengatakan, di wilayah tersebut kontur tanah yang curam mengharuskan dilakukan pemangkasan tebing (cut and fill) serta penimbunan untuk memastikan struktur jalan aman dan tahan lama.

"Dari Srigonco mengarah ke Balekambang itu memang alamnya cukup ekstrem. Jadi harus dikepras dan dilakukan timbunan," jelasnya.

Selain fokus pada peningkatan kualitas jalan, Pemkab Malang juga menaruh perhatian pada aspek keselamatan pengguna jalan. Salah

satunya dengan mengusulkan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) berbasis tenaga surya di sepanjang ruas tersebut.

Usulan tersebut telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI dengan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PJU solar cell dipilih karena dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan. "Kami telah mengajukan tambahan PJU solar cell ke Kementerian PUPR dengan menggunakan APBN," kata Oong.

Diproeksikan, sepanjang 30,485 kilometer ruas jalan Gondanglegi-Balekambang akan dipasang sekitar 600 hingga 620 unit PJU solar cell. Jarak antar lampu dirancang relatif rapat guna meningkatkan visibilitas dan keamanan pengguna jalan, terutama pada malam hari.

"Kalau idealnya jarak antar PJU sekitar 50 meter. Tapi kalau menyesuaikan efisiensi anggaran, bisa sampai 100 meter," terangnya. (Santi/Dya)

## Evaluasi 'RT Berkelas', Pemkot Hapus Pengadaan Meja-Kursi dan Tenda di 2027

**MALANG** - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengevaluasi ketat program Rukun Tetangga (RT) Berkelas. Hasilnya, pengadaan meja, kursi, dan tenda resmi dihapus dalam kamus usulan pelaksanaan tahun 2027 mendatang.

"Memang ada berbagai catatan evaluasi dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga perencanaan RT Berkelas 2027 mulai disusun lebih awal dan diselaraskan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta pokok pikiran (Pokir) DPRD," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, Minggu (12/4/2026).

Sebelumnya, publik sempat menyoroti pelaksanaan program bantuan Rp50 juta per RT tersebut, yang dinilai terburu-buru dan kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Salah satu masalah utama, yakni waktu pembahasan yang terlalu mepet, sehingga berdampak pada kualitas usulan di tingkat RT.

Diketahui, Musyawarah Kelurahan Khusus (Muskelsus) RT Berkelas baru dimulai pada November 2025 dan harus rampung pada Desember 2025. Rentang waktu yang sempit ini membuat proses perencanaan dinilai tidak maksimal.

Selain persoalan waktu, substansi usulan juga menjadi perhatian serius. Banyak RT justru mengajukan pengadaan meja, kursi, dan tenda dalam jumlah besar, yang dianggap tidak menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun, di Kecamatan Lowokwaru saja usulan pengadaan kursi mencapai 2.618 unit dengan total anggaran sekitar Rp1,3 miliar. Sementara itu, pengadaan meja di wilayah yang sama menembus angka Rp580 juta.

Menurut Dwi, saat ini Pemkot Malang tengah melakukan pencocokan data usulan RT dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum ditetapkan secara final. "Untuk kamus usulan hampir sama seperti 2026, tetapi khusus

kursi, meja, dan tenda dikecualikan," tegasnya.

Sebagai gantinya, Pemkot Malang mendorong usulan berbasis pembangunan tematik yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Penyesuaian juga dilakukan agar setiap usulan lebih spesifik sesuai kondisi lapangan.

Beberapa contoh usulan yang diprioritaskan antara lain, yakni perbaikan gorong-gorong sesuai spesifikasi teknis, pengadaan CCTV lingkungan, penyediaan laptop untuk posyandu, hingga pelatihan dan bimbingan teknis bagi masyarakat.

"Dengan kamus usulan yang lebih spesifik, program RT Berkelas dan musrenbang bisa berjalan efektif



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu. (Santi/Lentera)

tanpa saling tumpang tindih," imbuh Dwi.

Sementara itu, Camat Kedungkandang, Fahmi Fauzan, memastikan seluruh RT di wilayahnya telah mengikuti arahan terbaru RT Berkelas dari Pemkot Malang. (Santi/Dya)

# DIPLOMASI MARATON 25 JAM IRAN-AS **GAGAL**

Upaya diplomatik paling intensif di tahun 2026 yang dijuluki sebagai 'Islamabad Talks' resmi berakhir dengan kegagalan. Perundingan maraton yang mempertemukan delegasi tingkat tinggi Iran dan Amerika Serikat (AS) ini tercatat memecahkan rekor durasi negosiasi terlama sepanjang tahun, namun tetap gagal menghasilkan draf perjanjian hitam di atas putih untuk stabilitas Timur Tengah.

**D**imulai sejak Sabtu (11/4/2026) dan berlangsung tanpa henti hingga Minggu (12/4/2026) pagi, meja perundingan di ibu kota Pakistan itu menjadi saksi pergulatan ego dan kepentingan selama lebih dari satu hari penuh.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengonfirmasi betapa alotnya proses



tersebut. "Putaran perundingan itu merupakan yang terpanjang dalam tahun ini dan berlangsung selama total 24 hingga 25 jam," ujar Baghaei.

Meskipun sempat ada harapan munculnya titik terang, ia mengakui adanya hambatan yang tak terelakkan: "Kami mencapai kesepakatan dalam sejumlah isu, namun pandangan kami

berbeda pada dua atau tiga isu penting, dan pada akhirnya pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan."

Keseriusan kedua negara terlihat dari profil tokoh yang diturunkan. Iran mengutus Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan Menlu Abbas Araghchi. Sementara

dari pihak Washington, Presiden Donald Trump mengirimkan tim tangguh yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance, didampingi utusan khusus Steve Witkoff serta Jared Kushner.

Namun, kehadiran para pengambil kebijakan utama ini justru menegaskan tajamnya perbedaan prinsip. J.D. Vance menegaskan bahwa AS tetap pada pendiriannya, terutama terkait ambisi nuklir Teheran.

"Selama 21 jam (awal) kami telah melakukan sejumlah diskusi substantif dengan pihak Iran. Itu kabar baiknya. Kabar buruknya adalah kami belum mencapai kesepakatan," ujar Vance. Ia bahkan menambahkan dengan nada tegas bahwa kegagalan ini akan berdampak lebih buruk bagi Teheran. "Saya pikir itu adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada bagi Amerika Serikat."

## Tak Sepakati Nuklir dan Hormuz

Titik buntu utama dilaporkan berkisar pada dua isu krusial yaitu program nuklir Iran dan kontrol atas Selat Hormuz. Washington menuntut jaminan permanen agar Iran tidak memiliki kemampuan senjata nuklir.

"Faktanya sederhana, kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mencari senjata nuklir dan mereka tidak akan mencari alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mencapai senjata nuklir," tegas Vance.

Di sisi lain, laporan dari Kantor Berita Tasnim menyebutkan Iran menolak mundur dari kedaulatan militernya di Selat Hormuz dan menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak rakyat Iran dalam setiap butir kesepakatan.

Kegagalan di Islamabad menaruh beban berat pada gencatan senjata dua pekan yang sebelumnya diumumkan Presiden Donald Trump pada 8 April lalu. Pakistan, sebagai mediator di bawah pengawasan Panglima Angkatan Darat Asim Munir, terus berupaya meredakan ketegangan agar konflik fisik tidak kembali meletus.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mendesak kedua pihak untuk tetap berkepal dingin. "Pakistan akan terus memainkan perannya dalam memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Iran dan AS di hari-hari mendatang," ucap Dar saat melepas kepulangan kedua delegasi. (rtr, gus, ana, ist, dya)

## 5 GANJALAN DALAM PERUNDINGAN IRAN-AS

- **Konflik Lebanon & Hizbullah**  
Serangan Israel ke sekutu Iran memicu ketegangan dan mengganggu proses negosiasi.
- **Ketegangan di Selat Hormuz**  
Iran membatasi jalur kapal, AS menilai melanggar kesepakatan dan mengganggu perdagangan global.
- **Perbedaan soal Nuklir**  
AS menuntut penghentian total pengayaan uranium, Iran bersikeras itu haknya untuk tujuan sipil.
- **Pengaruh Sekutu Iran di Timur Tengah**  
Iran enggan melepas jaringan sekutu (Hizbullah, Houthi, Hamas) yang jadi alat pengaruh regional.
- **Tuntutan Pencabutan Sanksi**  
Iran meminta pencairan aset dan penghapusan sanksi, sementara AS belum siap memberi konsesi besar.



**DI TENGAH** kebuntuan diplomasi di Islamabad, Iran dilaporkan mulai mengambil langkah tegas dalam mengendalikan Selat Hormuz. Jalur vital yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia tersebut kini berada dalam kendali penuh otoritas Iran, yang berencana memberlakukan pembatasan ketat serta tarif melintas yang sangat tinggi bagi kapal-kapal komersial.

Laporan dari The Wall Street Journal menyebutkan bahwa Iran hanya akan mengizinkan sekitar 12 kapal untuk melintasi selat tersebut setiap harinya. Tidak hanya terbatas secara jumlah, biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal pun sangat fantastis. Untuk satu unit kapal

tanker berukuran besar, biaya perizinan melintas dikabarkan bisa mencapai 2 juta dolar AS atau setara dengan Rp34,2 miliar.

Kondisi ini memaksa sejumlah pemilik kapal internasional untuk melakukan negosiasi langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Selain biaya, kapal yang mendapat izin diwajibkan mengikuti rute khusus yang telah ditentukan serta memenuhi protokol perizinan yang ketat dari otoritas Teheran.

Seorang pejabat Iran menyatakan kepada CNN bahwa status dan kebijakan di Selat Hormuz tidak akan berubah selama kedua negara belum mencapai "kerangka bersama" yang disepakati. Pihak Iran menilai tuntutan Amerika Serikat terkait jaminan keamanan pelayaran masih terlalu berlebihan dan belum mengakomodasi hak-hak regional mereka.

Ketegangan di jalur ini diperparah dengan kekhawatiran adanya ranjau laut yang diduga dipasang oleh IRGC. Meskipun militer AS mengklaim telah mengerahkan kapal perusak untuk melakukan operasi pembersihan ranjau, klaim tersebut dibantah oleh

pihak Iran.

Kondisi keamanan yang belum stabil ini berdampak langsung pada pasar energi global.

Dua kapal tanker raksasa milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih tertahan dan belum dapat melintasi keluar dari wilayah Selat Hormuz.

Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memberikan penjelasan mendalam mengenai situasi di jalur pelayaran minyak paling vital di dunia tersebut.

Menurutnya, Selat Hormuz saat ini berada dalam kondisi sensitif masa perang, sehingga otoritas keamanan setempat menerapkan protokol pengamanan yang sangat ketat bagi setiap kapal yang melintas. "Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi biasa. Harus melalui beberapa protokol yang ditetapkan oleh pihak keamanan," ujar Boroujerdi saat ditemui di Universitas Paramadina. (wid, rtr, ist, dya)



# KEBIASAAN HARIAN YANG TAK DISADARI PICU POSTUR TUBUH RUSAK

**K**ebiasaan sehari-hari seperti duduk terlalu lama, tidur tengkurap, melakukan gerakan olahraga yang salah, atau memakai sepatu yang tak nyaman, ternyata bisa merusak postur tubuh Anda.

Postur yang buruk bukan hanya memengaruhi penampilan. Sering kali, itu juga menjadi tanda bahwa ada kebiasaan sehari-hari yang perlu diperbaiki. Menurut Dokter Sherry McAllister, kebiasaan buruk sehari-hari bisa menimbulkan efek samping yang nyata bagi tubuh.

"Efeknya bisa berupa nyeri, kaku, dan rasa tidak nyaman saat melakukan aktivitas sehari-hari," jelasnya, dikutip dari Real Simple pada Jumat, 27 Maret 2025.

## Duduk Terlalu Lama

Dokter Sherry menjelaskan bahwa kebiasaan duduk berjam-jam bisa membuat otot postural cepat lelah. "Duduk terlalu lama membuat otot-otot tubuh bagian dalam kelelahan, sehingga postur tubuh membungkuk dan lengkungan alami tulang belakang tidak terjaga," ujarnya. Selain durasi duduk, pilihan tempat duduk juga berpengaruh pada postur. Pastikan sofa, kursi, atau kursi kerja memberikan dukungan yang tepat untuk punggung, leher, dan bahu.

Sherry menyarankan memilih kursi dengan bantalan kokoh, penyangga punggung yang baik, dan tinggi dudukan yang pas agar kaki tidak tertekuk.

Tidur Tengkurap Hati-hati dengan kebiasaan tidur tengkurap, karena bisa membuat otot tegang. "Tidur tengkurap memaksa leher berputar ke samping, yang berisiko menimbulkan ketegangan otot," jelasnya.

Meski posisi tidur tidak selalu bisa dikendalikan, ahli yoga bersertifikasi Melie Purdon menyarankan memulai tidur dengan posisi lurus, seperti savasana (pose mayat). "Memulai malam dengan posisi tubuh yang tepat bisa menjadi pencegahan awal, meski kita tidak selalu bisa mengontrol sepenuhnya," ujarnya.

Selain itu, bantal yang terlalu tinggi atau rendah, serta kasur yang sudah rusak, juga dapat membahayakan kesehatan tulang belakang. "Hindari kasur dengan permukaan melengkung atau bergelombang. Kasur seperti ini bisa membuat otot tegang, tidur tidak nyaman, dan merusak postur tulang belakang," jelas Sherry.

Melie juga menekankan pentingnya memperhatikan pola gerak tubuh saat siang hari. Kebiasaan ini membantu tubuh lebih rileks dan siap beristirahat di malam hari. "Dengan mengubah pola gerak yang salah, postur tubuh bisa membaik, dan kualitas tidur pun meningkat," tambahnya.

## Kepala Miring Saat Pakai Gadget

Sherry menjelaskan, mencondongkan kepala ke depan saat menggunakan ponsel atau laptop adalah salah satu kebiasaan paling

umum yang merusak postur tubuh.

"Jika kepala terlalu maju dan tidak sejajar dengan bahu, tulang belakang harus bekerja lebih keras menahan beban. Inilah yang menyebabkan rasa sakit atau pegal di leher dan bahu," ujarnya.

Agar postur leher tetap sehat, pastikan layar gadget sejajar dengan pandangan mata saat digunakan. Kesalahan Gerak Olahraga

Olahraga memang baik untuk kesehatan, tapi gerakan yang salah justru bisa merusak postur tubuh. Misalnya, menundukkan kepala terlalu lama saat angkat beban berat bisa menimbulkan nyeri otot atau bahkan cedera.

Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan dan peregangan ringan, seperti memutar leher, bahu, dan beberapa gerakan lain untuk merilekskan otot yang tegang.

## Sepatu Tak Nyaman

Sepatu yang tidak nyaman, seperti terlalu kecil atau hak terlalu tinggi, bisa merusak postur tubuh jika sering digunakan.

"Sepatu dengan hak tinggi bisa menggeser posisi panggul ke depan, membuat beberapa otot menjadi tidak seimbang," jelas Sherry.

Sementara itu, sepatu dengan sol datar sering kali tidak memberikan dukungan cukup pada lengkungan kaki. Akibatnya, benturan saat berjalan akan diteruskan ke lutut hingga punggung bawah. Jika digunakan terlalu lama,

bagian-bagian ini bisa cepat lelah, pegal, bahkan berisiko cedera.

Untuk mencegah masalah tersebut, pilihlah sepatu dengan bantalan tumit yang baik dan sol yang mendukung penyerapan benturan, sehingga otot kaki dan tubuh bagian atas tetap terlindungi. (Itqiyah\_mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini).

## Postur yang tepat untuk beberapa kegiatan harian

### 1. Saat Duduk

Duduk tegak dengan punggung menempel pada sandaran, kaki menapak rata (hindari menyilangkan terlalu lama), layar sejajar mata, dan siku membentuk sudut  $\pm 90^\circ$  saat bekerja.

### 2. Saat Berdiri dan Berjalan

Berdiri tegak dengan bahu sedikit ke belakang dan otot perut aktif, beban tubuh merata di telapak kaki. Saat berjalan, pandangan lurus ke depan, lengan diayun alami, dan langkah dimulai dari tumit ke jari kaki.

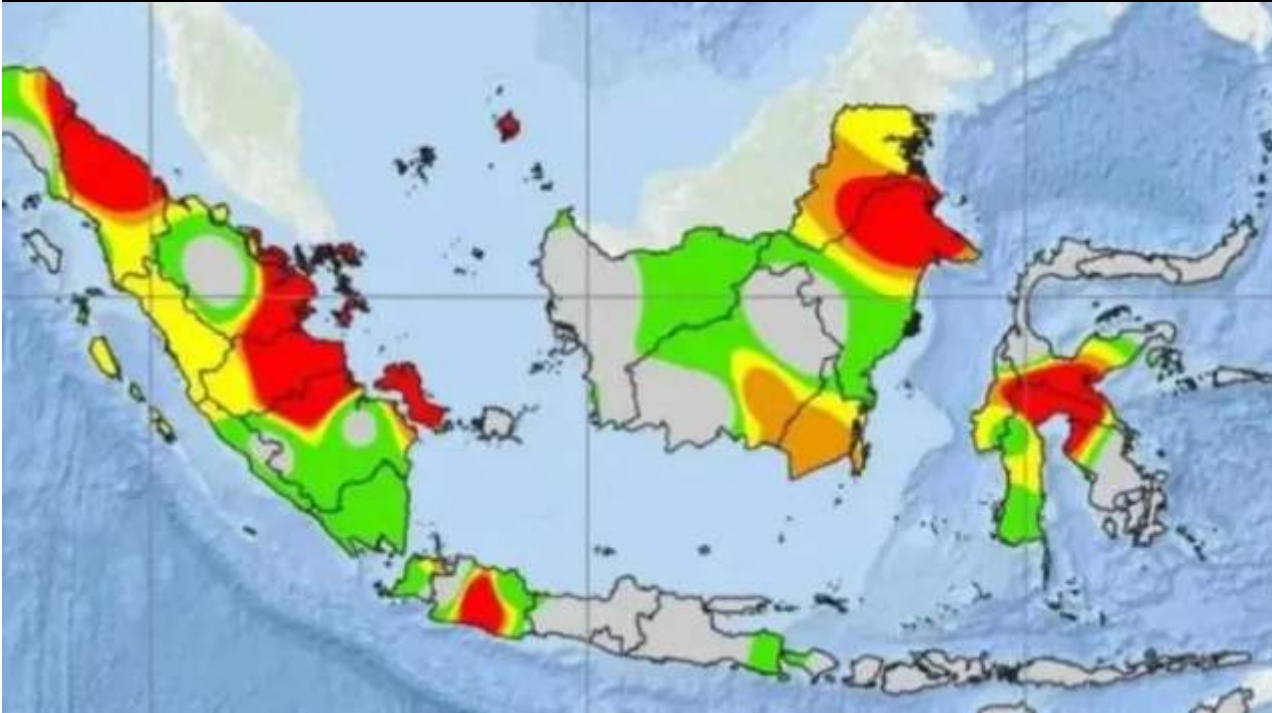
### 3. Saat Menggunakan Smartphone

Angkat ponsel setinggi mata agar leher tidak menunduk, serta beri waktu istirahat untuk leher dan tangan.

### 4. Saat Tidur

Telentang: Gunakan bantal di kepala/leher dan tambahkan di bawah lutut untuk menjaga tulang belakang.

# Sebaran Zona Megathrust Indonesia: Potensi Gempa hingga 9,2 M



karena lokasinya yang dekat dengan Kepulauan Talaud di utara Indonesia. Zona ini diperkirakan memiliki potensi magnitudo maksimum hingga 8,3.

Di sisi lain, lima segmen megathrust dihapus dari daftar aktif. Segmen-segmen ini sebelumnya dianggap berpotensi, namun evaluasi terbaru menunjukkan bahwa mereka kini dinilai tidak aktif atau memiliki risiko lebih rendah. Misalnya, beberapa segmen di wilayah Sumatera dan Jawa dihapus berdasarkan kajian terkini yang menegaskan penurunan risiko.

Meski demikian, para peneliti menekankan pentingnya terus memantau dan meninjau aktivitas seismik di wilayah-wilayah ini seiring munculnya data baru di masa depan. Jawa dan Sumatera tetap menjadi fokus utama, mengingat tingginya kepadatan penduduk dan konsentrasi infrastruktur kritis di kedua wilayah tersebut.

Data terkini menunjukkan bahwa beberapa segmen megathrust mengalami kenaikan signifikan dalam estimasi kekuatan gempa. Zona megathrust Mentawai-Pagai, misalnya, potensi magnitudo maksimumnya naik dari 8,5 pada 2017 menjadi 8,9 pada pembaruan 2024.

Zona megathrust Sulawesi Utara, yang memicu gempa Bitung pada Kamis (2/4/2026), juga mengalami revisi potensi kekuatan dari magnitudo 7,9 menjadi 8,5. "Peningkatan magnitudo maksimum di berbagai wilayah ini menunjukkan pentingnya pengamatan dan penelitian lebih lanjut terhadap karakteristik seismik lokal," jelas para ahli. Hingga saat ini, segmen Aceh-Andaman tercatat memiliki potensi gempa terbesar dengan magnitudo mencapai 9,2, diikuti oleh zona megathrust Jawa dengan potensi hingga magnitudo 9,1. (Itqiyah mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini).

Indonesia dikelilingi belasan zona megathrust yang berpotensi memicu gempa besar. Salah satunya telah terjadi di Bitung, gempa berkekuatan M7,6 pada Kamis (2/4/2026) hingga memicu tsunami kecil.

Berdasarkan penelitian terbaru yang dirilis dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024, para ahli mengungkapkan bahwa terdapat 14 zona megathrust aktif di Indonesia yang memiliki potensi menimbulkan gempa besar sekaligus tsunami di masa mendatang. Jumlah zona megathrust di Indonesia tercatat mengalami sedikit peningkatan dibandingkan data sebelumnya. Dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024,

disebutkan terdapat 14 segmen, naik dari 13 segmen pada peta 2017 dan 11 segmen pada peta 2010.

"Untuk segmentasi sumber gempa megathrust relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu berjumlah 14 segmen di tahun 2024, sedangkan tahun 2017 ada 13 segmen dan tahun 2010 ada 11 segmen," menurut keterangan para ahli dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia tahun 2024.

Para peneliti menambahkan bahwa pembaruan segmentasi megathrust ini didasarkan pada berbagai publikasi ilmiah yang dirilis antara 2017 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan 11 segmen berada di wilayah Indonesia, sementara 3 segmen lainnya berada di

Filipina, namun tetap berpotensi berdampak signifikan bagi Indonesia.

Data terbaru ini mencerminkan evaluasi seismik terkini, termasuk penambahan zona baru serta pembaruan potensi magnitudo pada segmen yang sudah ada. "Sebanyak 7 segmen megathrust mengalami pembaruan data, dengan potensi magnitudo maksimum yang disesuaikan berdasarkan informasi terbaru," ujar para ahli.

Salah satu penambahan paling mencolok dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 adalah identifikasi zona megathrust Cotabato Trench. Meskipun secara geografis berada di Filipina, zona ini dimasukkan sebagai sumber gempa



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
[www.lenteratoday.com](http://www.lenteratoday.com)  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH  
**DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

# Tak Perlu Filter! Cara Fotogenik di Depan Kamera

**B**anyak orang merasa hasil foto mereka kurang maksimal. Hal ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pencahayaan yang kurang tepat, sudut pengambilan gambar yang tidak sesuai, hingga ekspresi wajah yang terlihat kaku.

Padahal, terlihat fotogenik tidak selalu berkaitan dengan memiliki wajah yang sempurna atau menggunakan kamera mahal. Ada beberapa hal sederhana yang bisa diperhatikan agar hasil foto tampak lebih menarik. Salah satu kunci utama agar terlihat fotogenik adalah memahami sudut wajah terbaik saat difoto. Selain itu, pencahayaan yang

baik juga sangat berpengaruh dalam menghasilkan gambar yang lebih jelas dan proporsional.

Tidak kalah penting, rasa percaya diri juga dapat membuat ekspresi wajah terlihat lebih natural di depan kamera.

## Kenali Angle Foto Terbaikmu

Salah satu cara agar terlihat lebih menarik di foto adalah dengan memahami sudut pengambilan gambar yang paling sesuai dengan wajah. Pemahaman tentang angle foto dapat membantu menghasilkan

gambar yang terlihat lebih proporsional.

Sudut pengambilan yang tepat juga dapat menonjolkan beberapa fitur wajah, seperti garis rahang, hidung, maupun mata. Karena itu, penting untuk mengetahui angle mana yang paling cocok.

Cara paling mudah untuk menemukannya adalah dengan mencoba berfoto sendiri dari beberapa sudut yang berbeda. Ambil beberapa foto dari berbagai posisi, kemudian bandingkan hasilnya.

Dari percobaan tersebut, biasanya seseorang akan menyadari bahwa salah satu sisi wajah terlihat lebih fotogenik dibandingkan sisi lainnya. Jika sudah menemukan sudut yang paling pas, gunakan angle tersebut saat berfoto agar hasil gambar terlihat lebih maksimal.

## Gunakan Ekspresi Wajah yang Natural

Salah satu hal yang dapat membuat seseorang terlihat lebih fotogenik di depan kamera adalah menampilkan ekspresi wajah yang alami. Ekspresi yang terlalu dipaksakan, seperti senyum yang terlalu lebar atau tatapan yang terlihat tegang, justru sering menimbulkan kesan kaku pada foto.

Ketegangan kecil pada wajah pun bisa tertangkap kamera dan memengaruhi hasil akhir gambar. Karena itu, penting untuk menjaga ekspresi tetap santai saat difoto.

Sebaliknya, ekspresi yang tulus dan rileks akan memberikan kesan hangat serta lebih autentik. Senyum ringan dengan tatapan mata yang tenang dapat menampilkan karakter diri secara lebih alami tanpa terlihat dibuat-buat.

Agar hal tersebut tercapai, penting untuk merasa percaya diri dan tetap santai ketika berada di depan kamera. Dengan begitu, ekspresi wajah dapat terlihat lebih nyaman dan hasil foto pun tampak lebih natural.

## Perhatikan Lighting

Pencahayaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi hasil akhir sebuah foto. Pencahayaan yang tepat dapat membantu menonjolkan fitur wajah, memberikan dimensi pada gambar, serta membuat foto terlihat lebih hidup.

Sebaliknya, pencahayaan yang kurang sesuai dapat menimbulkan bayangan tajam, membuat kulit terlihat kusam, bahkan mengubah warna asli objek yang difoto.

Salah satu sumber pencahayaan terbaik untuk fotografi adalah cahaya matahari pada pagi atau sore hari. Pada waktu tersebut, sinar matahari cenderung lebih lembut dan sangat sehingga cocok digunakan sebagai pencahayaan alami. Selain memanfaatkan cahaya alami, penggunaan lampu tambahan juga dapat membantu menghasilkan foto yang lebih baik.

Yang tidak kalah penting, sebaiknya hindari mengambil gambar di tempat yang minim cahaya karena kondisi tersebut dapat membuat hasil foto terlihat kurang maksimal.

## Pilih Warna Pakaian yang Tepat

Pemilihan warna pakaian juga dapat memengaruhi tampilan seseorang dalam sebuah foto. Warna yang tepat tidak hanya membantu menonjolkan karakter, tetapi juga dapat menciptakan keseimbangan pada keseluruhan penampilan.

Warna pakaian yang sesuai bahkan bisa membuat kulit terlihat lebih cerah sehingga tampilan di foto terlihat lebih segar.

Selain warna, pola dan motif pakaian juga perlu diperhatikan. Motif yang terlalu ramai atau berukuran sangat kecil terkadang dapat mengalihkan perhatian dari wajah.

Sebaliknya, pakaian dengan warna polos atau pola yang sederhana biasanya lebih mampu menonjolkan ekspresi wajah dan bentuk tubuh secara lebih seimbang. (Ella-Mahasiswa UINSA, berkontribusi dalam tulisan ini).



**Ugal-ugalan ,...dari hal 1**

**B**adan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang baru saja dibentuk untuk mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kini berada di bawah pengawasan ketat publik dan otoritas keuangan negara. Bukannya menjadi garda terdepan dalam pengentasan stunting, lembaga ini justru dinilai terjebak dalam kontroversi pengadaan barang operasional yang dinilai tidak krusial dan cenderung eksekusif.

Temuan dari Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap adanya alokasi anggaran yang sangat besar untuk perangkat pendukung birokrasi. BGN tercatat menganggarkan Rp1,1 triliun hanya untuk belanja laptop dan tablet. Rinciannya, Rp544 miliar dialokasikan untuk 32.000 unit laptop dan Rp510,1 miliar untuk 30.000 unit tablet, dengan harga per unit diperkirakan mencapai Rp17 juta hingga Rp24 juta.

Tak berhenti di sana, pengadaan motor listrik untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan (SPPG) menelan biaya Rp1,2 triliun untuk sekitar 21.000 hingga 25.000 unit. Anggaran ini memicu polemik karena sebelumnya sempat mendapat penolakan dari otoritas keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap pos-pos belanja tersebut.

"Kami akan menyalisir kembali anggaran BGN dan mencoret pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan penyediaan makanan," tegas Purbaya dikutip Minggu (12/4/2026).

Disorientasi prioritas semakin terlihat pada pos belanja perlengkapan pegawai yang bersifat trivial. BGN menganggarkan dana Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaus kaki lapangan, yang berarti satu pasang kaus kaki dihargai sekitar Rp100.000. Selain itu, belanja seragam untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) menyedot dana sebesar Rp68,3 miliar.

Jajang Nurjaman, Koordinator CBA, menilai angka-angka tersebut tidak masuk akal dan berpotensi mengandung pengelembungan harga (mark-up). Belum lagi adanya anggaran Rp113 miliar yang dialokasikan khusus untuk jasa event organizer (EO). Kepala BGN, Dadan Hindayana, berdalih bahwa anggaran tersebut diperlukan untuk membangun fondasi lembaga baru.

"Anggaran tersebut digunakan untuk membangun sistem dan tata kelola lembaga yang baru saja berdiri," ujar Dadan dalam penjelasannya kepada media.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga terdapat upaya

mengakali nomenklatur anggaran dengan mengubah istilah komputer menjadi perangkat lain seperti tablet atau laptop agar tetap dapat direalisasikan.

Pada 2026, BGN kembali menganggarkan pembelian laptop berukuran 14 inci senilai Rp14,8 miliar, meskipun jumlah unit yang akan dibeli tidak diungkapkan secara rinci.

Uchok menilai angka tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar. Ia bahkan memperkirakan potensi kerugian dapat mencapai Rp1,1 triliun.

Menurutnya, apabila pengadaan tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, maka berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

"Ini bukan sekadar soal belanja, tapi menyangkut penyalahgunaan wewenang dan prosedur anggaran," tegasnya.

Kasus ini memunculkan desakan agar pemerintah membuka secara transparan detail pengadaan di BGN, termasuk spesifikasi barang dan

mekanisme pengadaannya.

Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menegaskan, Parlemen membuka opsi memanggil Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebagai mitra kerja, politikus PKB ini menegaskan, penting bagi Komisi IX DPR meminta klarifikasi BGN. Terutama, terkait pengadaan 25.000 unit motor listrik operasional program MBG yang kini menjadi polemik di masyarakat.

"Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas," kata Neng Eem dalam keterangan persnya, Minggu (12/4/2026).

**Diklaim Sebagai Kebutuhan Strategis**

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi terkait alokasi anggaran sebesar Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) yang memicu polemik di ruang publik.

Menurut Dadan, penggunaan jasa pihak ketiga tersebut bukan sekadar urusan seremonial, melainkan kebutuhan mendesak bagi lembaga yang baru seumur jagung.

Dadan menjelaskan bahwa sebagai lembaga baru yang mengemban mandat program strategis nasional, BGN saat ini masih dalam fase pembangunan struktur dan tata kelola. Minimnya sumber daya manusia (SDM) internal yang siap menangani kegiatan berskala besar menjadi alasan utama pelibatan profesional dari luar.

"Sebagai lembaga baru... BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," ujar Dadan.

Ia menambahkan bahwa keahlian dalam manajemen acara, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional merupakan kompetensi yang secara realistis belum dimiliki oleh tim internal BGN di fase awal ini.

Lebih lanjut, Dadan memaparkan bahwa anggaran jumbo tersebut mencakup berbagai agenda krusial, termasuk bimbingan teknis (bimtek) bagi para penjamah makanan guna menjamin standar keamanan pangan nasional.

Penggunaan EO dianggap sebagai solusi jembatan (bridging) agar program dapat segera dieksekusi tanpa harus menunggu proses rekrutmen dan pelatihan staf internal yang memakan waktu lama. (wid,ist,kum,dtc/dya)

**Ratusan Dapur MBG Kembali Ditutup**

**BADAN** Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Penindakan ini dipicu oleh temuan pelanggaran standar kualitas, masalah kebersihan, hingga kasus gangguan pencernaan yang dialami oleh penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menjelaskan, ketika keBerdasarkan data terbaru per 10 April 2026, jumlah dapur gizi yang ditangguhkan di Wilayah II (Pulau Jawa) telah menyentuh angka 362 unit. Penambahan signifikan terjadi dalam periode laporan sepekan terakhir dengan 41 unit SPPG baru yang dikenai sanksi serupa.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, menegaskan bahwa tindakan tegas ini tidak dapat ditawar demi keselamatan publik. "Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan," ujar Doni dalam keterangan resminya.

Laporan pengawasan mengungkap beragam masalah fatal di lapangan. Di Bogor dan Purworejo, ditemukan unit yang beroperasi tanpa pengawas gizi dan keuangan. Sementara di Brebes dan Sampang, petugas menemukan menu makanan yang dikategorikan tidak layak konsumsi. Kasus yang lebih serius dilaporkan terjadi di Cimahi, Bogor, Tasikmalaya, Bantul, hingga Mojokerto, di mana muncul dugaan gangguan pencernaan pasca-konsumsi makanan dari dapur tersebut.

Kondisi serupa terjadi di Wilayah III (Indonesia Timur). Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, mencatat 165 unit dari total 4.300 SPPG telah dihentikan sementara. Penyebab utamanya adalah absennya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.

Rudi menjelaskan bahwa penangguhan ini adalah bentuk koreksi agar seluruh pengelola mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku. "Penghentian kegiatan operasional sementara ini merupakan langkah korektif untuk memastikan

semua SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan," tegasnya.

Sebelumnya pada awal April, BGN bahkan sempat menyetop operasional 1.256 SPPG di wilayah timur karena masalah pendaftaran SLHS yang belum tuntas. Otoritas BGN menekankan bahwa seluruh dapur yang sedang menjalani masa suspensi wajib melakukan pembenahan total secara teknis maupun manajerial sebelum diizinkan kembali mendistribusikan makanan kepada pelajar.

Terpisah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkap adanya pembenahan besar-besaran dalam rantai distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini masuk dalam radar evaluasi ketat dan terancam dihentikan operasionalnya karena terbukti melanggar aturan teknis yang ditetapkan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk pengawasan terhadap vendor atau unit penyedia yang tidak menjalankan mandat sesuai standar gizi dan prosedur yang berlaku. (wid,ist/dya)

# KPK WANTI- WANTI FORKOPIMDA TULUNGAGUNG TERENDUS TERIMA THR HASIL PEMERASAN BUPATI

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), kian melebar dan menyingkap fakta-fakta memprihatinkan terkait tata kelola birokrasi di wilayah tersebut. Selain digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan keperluan pribadi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa uang hasil pemerasan terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut juga mengalir dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

**T**emuan ini dikonfirmasi langsung oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Dalam keterangannya, Asep menyebut bahwa sebagian dari uang yang



Petugas KPK menunjukkan barang bukti saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam. (Dok)

dikumpulkan melalui intimidasi terhadap ASN tersebut digunakan untuk menjalin relasi di tingkat elit daerah. "Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(Forkopimda) di Pemkab Tulungagung," ujar Asep dikutip Minggu (12/4/2026).

Merespons fakta tersebut, lembaga antirasuah ini memberikan peringatan keras sekaligus nasihat bagi jajaran pimpinan daerah di Tulungagung. KPK

menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mendukung program pro-rakyat tanpa dicemari oleh pemberian-pemberian yang berasal dari praktik ilegal. Asep mengingatkan bahwa integritas adalah harga mati, terutama dalam masa-masa kebijakan efisiensi anggaran negara.

"Termasuk praktik pemberian THR kepada Forkopimda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dan Forkominda harus punya komitmen yang sama untuk saling bekerja sama dan mendukung program-program yang bertujuan untuk me-majukan masyarakat daerah, dengan penuh integritas, tanpa melakukan pemberian-pemberian yang melanggar ketentuan hukum dan norma," tegas Asep.

Sorotan tajam KPK ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang ada, tingkat kerentanan korupsi di wilayah ini masih tergolong mengkhawatirkan. Hal tersebut tercermin dari skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang belum menunjukkan angka ideal. Skor ini menjadi salah satu indikator mengapa praktik pemerasan sistematis seperti yang dilakukan Gatut Sunu bisa terjadi dan seolah-olah langgeng di birokrasi setempat.

"Seperti diketahui, skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulungagung tahun 2025 masih berada dalam kategori rentan, yaitu 72,32, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 Kabupaten/Kota di daerah Jawa Timur," papar Asep secara rinci.

Sebelumnya, Gatut Sunu Wibowo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Modus yang digunakan terbilang kejam; bupati memaksa bawahannya menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai jaminan loyalitas dan setoran uang.

Hingga saat ini, Gatut langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. "KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," tutup Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.(her,ist,ant/dya)

## GELOMBANG RASUAH AWAL 2026: 10 OTT DALAM 4 BULAN

- **Wali Kota Madiun (Maidi):** Dugaan pemerasan dan gratifikasi proyek (Januari).
- **Bupati Pati (Sudewo):** Kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa (Januari).
- **Bupati Pekalongan (Fadia Arafiq):** Korupsi pengadaan outsourcing & proyek; keuntungan pribadi Rp19 miliar (Maret).
- **Bupati Rejang Lebong (M. Fikri Thobari):** Suap proyek ijon untuk kebutuhan Lebaran (Maret).
- **Bupati Cilacap (Syamsul Auliya Rachman):** Pemerasan THR Lebaran kepada SKPD senilai Rp610 juta (Maret).
- **Bupati Tulungagung (Gatut Sunu Wibowo):** Pemerasan pejabat OPD; minta jatah 50% dari penambahan anggaran (April).
- **KPP Madya Jakarta Utara:** Suap pengaturan pajak sektor pertambangan; 5 tersangka termasuk pejabat pajak (Januari).
- **Ditjen Bea Cukai:** Korupsi importasi barang; menjerat mantan Direktur Penindakan dan jajaran intelijen (Februari).
- **KPP Madya Banjarmasin:** Suap restitusi PPN senilai Rp1,5 miliar (Februari).
- **PN Depok:** Suap pengurusan sengketa lahan; melibatkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok (Februari).

**RENTETAN** operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para pemimpin daerah di Jawa Timur periode 2025-2030 memicu keprihatinan mendalam. Terhitung sejak dilantik pada Februari 2025, sudah tiga kepala daerah di wilayah ini yang harus berurusan dengan hukum akibat kasus rasuah. Mereka adalah Bupati Ponorogo, Wali Kota Madiun, dan yang terbaru adalah Bupati Tulungagung.

Menanggapi fenomena "tsunami" korupsi di wilayahnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya angkat bicara. Ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-80 di UIN

## Tiga Kepala Daerah Terjerat OTT, Gubernur Jatim Buka Suara

Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Minggu (12/4/2026), Khofifah sangat menyayangkan jatuhnya para kepala daerah tersebut dalam jeratan kasus korupsi, mengingat upaya pencegahan telah dilakukan secara intensif.

Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU tersebut mengungkapkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan KPK sebenarnya sudah berjalan rutin.

"Kita semua sebetulnya melakukan koordinasi cukup intensif ya, ada grup (WhatsApp) kepala daerah, dengan tim KPK juga ada. Dan sebetulnya kabupaten kota sudah pernah diajak untuk saling mencari solusi oleh KPK, tinggal ini Pemprovnya," ujar Khofifah.

Menurutnya, pemanggilan kepala daerah secara personal oleh lembaga antirasuah tersebut juga telah dilakukan sebagai langkah preventif. "Jadi sebetulnya semua kabupaten-kota sudah pernah dipanggil satu per satu, harapan kita tentu semua bisa menjaga

pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik," sambung Khofifah menegaskan pentingnya integritas dalam memimpin daerah.

Kini, dengan ditetapkannya status hukum bagi para bawahannya tersebut, Khofifah menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses yang sedang berjalan kepada pihak berwenang. "Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum, kepada KPK untuk mencari format, ini kan kewenangannya di KPK, kira-kira begitu," tegasnya.

Sebagai pengingat, badai OTT di Jawa Timur ini dimulai dengan penangkapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada 7 November 2025 terkait suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono.

Belum reda guncangan tersebut, Wali Kota Madiun, Maidi, menyusul terjaring operasi senyap pada 19 Januari 2026 atas dugaan pemerasan dana CSR dan biaya perizinan. (pra,ist,ant/dya)